



RLPPD RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
Palangka Raya, Maret 2025**



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,73	74,28	0,746
2	Angka Kemiskinan	5,11	5,17	1,174
3	Angka Pengangguran	4,1	4,01	-2,195
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,14	4,46	7,729
5	Pendapatan Perkapita (ribu rupiah)	75.271,20	79.319,70	5,379
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,317	0,301	-5,047



2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

A. Indikator Kinerja Fungsi Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	79,81%	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	91,36%	Dinas Pendidikan	
2.	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,368 per 1000 penduduk	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	0%	Dinas Kesehatan	Pada tahun 2024 tidak terdapat penetapan status situasi KLB yang diakibatkan oleh wabah/penyakit menular oleh Gubernur Kalimantan Tengah
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	di Provinsi Kalimantan Tengah tidak terdapat bangunan penahan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		oleh infrastruktur pengendalian banjir			banjir yang pernah dibangun di WS kewenangan provinsi sampai dengan tahun 2024
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	97,87%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	53,5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki SPAM curah lintas kabupaten/kota
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki SPALD Regional (lintas kabupaten/kota)
		Rasio kemandapan jalan	82,08%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	92,19%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah	0%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Pada tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah tidak melaksanakan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			program/kegiatan pemerintah untuk merelokasi rumah warga.
		Persentasi Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	6,74%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	96,58%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	64,29%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	
		Persentase penanganan pra bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	Dinas Sosial	
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	Dinas Sosial	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	Dinas Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	Dinas Sosial	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	Dinas Sosial	
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
7	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	85,71%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,73%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.36,05 juta per tahun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	5,06%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	36,68%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	53,48%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,15%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	3,5 per 10.000 anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10,4 per 100.000 penduduk perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9	Pangan	Persentase cadangan pangan	132,95%	Dinas Ketahanan Pangan	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	99,33%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	0%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Sampai dengan tahun 2024 belum ada KPPR lintas Kab/Kota yang diproses di Provinsi
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indek 74,8	Dinas Lingkungan Hidup	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	87,32%	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	2 dokumen Capaian 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Pemanfaatan data kependudukan	33,33%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	39,86%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	14,91%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka 2,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	65,82%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,63%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	0.731	Dinas Perhubungan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,37	Dinas Perhubungan	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	61,54%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
17	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	13,10%	Dinas Koperasi dan UKM	
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	2,46%	Dinas Koperasi dan UKM	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	12,62%	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,01%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	11,05%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Peningkatan prestasi olahraga	40 medali	Dinas Pemuda dan Olahraga	
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	65,89%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
33	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	71,275	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	72,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	62,19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	16,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Urusan Pilihan					
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	105,76%	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP	93,62%	Dinas Kelautan dan Perikanan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku			
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	654,86%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	82,33%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Tingkat hunian akomodasi	21,69%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,87%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	361,92 ton	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	31,61%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
28	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	84,42%	Dinas Kehutanan	
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0,00329%	Dinas Kehutanan	
		Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,048%	Dinas Kehutanan	
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	98,46%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
30	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-19,40%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	97,83%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Tertib Usaha	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kalimantan Tengah masih belum memiliki pelabuhan internasional maupun bandar udara dengan rute internasional, sehingga tidak ada penerbitan izin Toko Bebas Bea maupun SIUP Minuman Beralkohol - Toko Bebas Bea (MB TBB).
		Persentase kinerja realisasi pupuk	65,58%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	6,64	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
21	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	8,79%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	170,96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum ada pemantauan dan pengawasan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI pada Tahun 2024.



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	sampai dengan tahun 2024 belum ada permohonan untuk izin perluasan usaha industri besar (IPUI) besar
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Berdasarkan data OSS, hingga tahun 2024 belum ada permohonan yang disampaikan dalam rangka perizinan Kawasan Industri yang berlokasi di wilayah Kalimantan Tengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kalimantan Tengah belum memiliki Kawasan Industri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019.
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	Transmigrasi				

B. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	6,21%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Rasio PAD	33,86%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	40,83%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Opini Laporan Keuangan	10 kali WTP	Inspektorat	



No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	
	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak terdapat kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2024
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	74,69%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	51,04%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	133,27%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	77,03%	Badan Kepegawaian Daerah	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,70%	Badan Kepegawaian Daerah	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	72,24%	Badan Kepegawaian Daerah	
	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	10,62%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD	4,61%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	



No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		terhadap anggaran PAD dalam APBD			
		Assets management	3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,31%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	88,41%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

A. HASIL EPPD TAHUN 2022

Pemerintah terakhir menyampaikan hasil EPPD adalah untuk penilaian LPPD tahun 2022. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023, Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mendapatkan hasil EPPD terhadap LPPD 2022 dengan skor kinerja 2,5979 dan status kinerja RENDAH.

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Berdasarkan Laporan Nomor 24.A/LHP/XIX.PAL/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mendapatkan Opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.



4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Unaudited) Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mencapai sebesar Rp.8.331.242.675.150,22 dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mencapai Rp. 9.043.645.133.321,86.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Uraian (Berdasarkan PP 12 Tahun 2019)	Target P-APBD 2024 (Rp.)	Realisasi APBD 2024 (Rp.)	%	Realisasi APBD 2023 (Rp.)
4.	PENDAPATAN DAERAH	9.227.019.051.847,00	8.331.242.675.150,22	90,29	6.730.216.813.007,10
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.699.466.041.860,00	2.815.935.689.387,94	104,31	2.589.901.319.397,60
4.1.01	Pajak Daerah	2.203.674.709.512,00	2.370.006.827.406,00	107,55	2.248.569.870.237,08
4.1.02	Retribusi Daerah	9.262.712.000,00	11.804.668.687,00	127,44	26.054.701.474,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	120.602.368.190,00	38.850.939.359,67	0,00	1.338.932.578,29
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	365.926.252.158,00	395.273.253.935,27	108,02	313.937.815.108,23
4.2	Pendapatan Transfer	6.519.487.759.987,00	5.330.645.950.460,00	81,76	4.127.977.388.415,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.516.057.759.987,00	5.326.975.950.460,00	81,75	4.123.577.388.415,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	6.505.015.597.987,00	5.315.933.797.460,00	81,72	4.084.959.728.415,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	38.617.660.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	11.042.162.000,00	11.042.153.000,00	100,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.430.000.000,00	3.670.000.000,00	107,00	4.400.000.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	3.430.000.000,00	3.670.000.000,00	107,00	4.400.000.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	8.065.250.000,00	184.661.035.302,28	2.289,59	12.338.105.194,50
4.3.01	Hibah	8.065.250.000,00	9.357.191.000,00	116,02	10.236.951.429,50
4.3.03	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	175.303.844.302,28	0,00	2.101.153.765,00
5.	BELANJA DAERAH	10.220.158.094.735,00	9.043.645.133.321,86	88,49	6.326.371.485.915,40
5.1	Belanja Operasi	5.725.261.615.353,08	4.930.181.060.988,01	86,11	3.412.541.268.044,40
5.1.01	Belanja Pegawai	1.590.801.498.837,92	1.488.211.963.286,00	93,55	1.249.271.775.759,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.676.915.407.019,72	2.171.846.707.434,45	81,13	1.523.833.347.472,40
5.1.04	Belanja Subsidi	2.375.000.000,00	174.875.000,00	7,36	146.097.500,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.011.529.864.208,44	859.536.679.267,56	84,97	599.677.891.463,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	443.639.845.287,00	410.410.836.000,00	92,51	39.612.155.850,00
5.2	Belanja Modal	3.125.636.130.945,51	2.957.791.111.824,85	94,63	1.537.607.579.233,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	4.235.409.636,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	845.915.044.152,38	811.450.292.030,03	95,93	312.460.672.598,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.102.951.379.816,53	1.034.917.180.090,33	93,83	729.057.225.725,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.156.918.822.051,60	1.091.905.743.304,49	94,38	477.850.366.407,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.884.162.457,00	15.856.535.900,00	99,83	14.003.904.867,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.966.722.468,00	3.661.360.500,00	92,30	0,00
5.3	Belanja Tidak terduga	65.046.664.874,41	18.325.909.159,00	28,17	11.165.581.446,00



No.	Uraian (Berdasarkan PP 12 Tahun 2019)	Target P-APBD 2024 (Rp.)	Realisasi APBD 2024 (Rp.)	%	Realisasi APBD 2023 (Rp.)
5.4	Belanja Transfer	1.304.213.683.562,00	1.137.347.051.350,00	87,21	1.365.057.057.192,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.279.823.683.562,00	1.131.963.051.350,00	88,45	1.343.717.357.192,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	24.390.000.000,00	5.384.000.000,00	22,07	21.339.700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT) = 4 - 5	-993.139.042.888,00	-712.402.458.171,64	71,73	403.845.327.091,70
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	993.139.042.888,00	1.127.878.580.652,83	113,57	709.293.715.796,73
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.293.139.042.888,00	1.259.078.580.652,83	97,37	939.893.715.796,73
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.113.139.042.888,00	1.066.078.580.652,83	95,77	939.893.715.796,73
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	180.000.000.000,00	180.000.000.000,00	100,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	300.000.000.000,00	131.200.000.000,00	43,73	230.600.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	300.000.000.000,00	131.200.000.000,00	43,73	130.600.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	993.139.042.888,00	1.127.878.580.652,83	113,57	709.293.715.796,73
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	0,00	415.476.122.481,19	0,00	1.113.139.042.888,43

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

- Helpdesk LPSE, merupakan inovasi untuk membantu pelaksana, penyedia dan pejabat pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara online
- SIAP BAJASA, Sistem Informasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dimanfaatkan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk proses administrasi persiapan pelaksanaan pengadaan, pemantauan proses pelaksanaan pengadaan hingga evaluasi hasil pengadaan barang dan jasa.
- Website Biro PBJ, sarana sosialisasi dan deseminasi PBJ bagi pelaksana dan penyedia pengadaan barang dan jasa
- OPERA KATA, Optimalisasi Pengawasan Reklamasi pada Bukaian Tambang, inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan tugas Pengusahaan, Pembinaan, Pengawasan dan sarana keterbukaan informasi bagi masyarakat.



- e. PERIZINAN ON SITE, Inovasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu agar mempermudah pelayanan perizinan berusaha di daerah terpencil yang susah dijangkau oleh sinyal internet.
- f. E-SIPASTI, inovasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dalam rangka efisiensi waktu, tenaga dan biaya dalam rangka penyelesaian proses tindak lanjut dari perangkat daerah dan meningkatkan keakuratan data dan informasi hasil pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut.
- g. Whistle Blowing System (WBS), inovasi yang digunakan Inspektorat Provinsi sebagai alat pencegahan dan deteksi dini suatu pelanggaran kode etik, pedoman perilaku dan benturan kepentingan yang dilakukan baik oleh pegawai maupun pejabat di lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah
- h. Geoportal "LAUT BERKAH", Inovasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka memberikan justifikasi terkait permohonan KKPRL melalui overlay titik koordinat dan menyediakan peta online RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah sebagai informasi terkait potensi investasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha / calon investor.
- i. Lewu Berkah – Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintahan Desa (SIAPDES), inovasi yang dimanfaatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, tertib administrasi dengan berbasis pelayanan digital.
- j. Sistem Data Sektoratl berbasis WEB (SIDARA), Inovasi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengintegrasikan data-data sektoral dan mendukung program Satu Data Indonesia serta keterbukaan informasi publik.
- k. SIGA – Sistem Informasi Gender dan Anak, inovasi yang dibuat dan dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kemudahan akses dan pengumpulan data terpilih di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- l. Buku Data Terpilih (digital), informasi yang bersifat inovatif yang disampaikan secara digital agar tercipta satu sistem satu data terpilih di lingkungan DP3AAPPKB Provinsi Kalimantan Tengah



- m. Website UPT-PPA: <http://uptppa.kalteng.go.id> (digital), dibangun untuk mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik oleh DP3AAPPKB Provinsi Kalimantan Tengah.
- n. Hotline layanan kasus UPT-PPA: 0811-5201-515 (digital) media pengaduan tidak langsung bagi korban kekerasan bagi perempuan dan anak.
- o. Website kerja berkah, dibangun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam rangka memfasilitasi keterhubungan antara pencari kerja dan pemangku kepentingan (pemerintah)
- p. Website Pelatihan Kerja Berkah, dibangun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam rangka memfasilitasi keterhubungan antara pencari kerja dengan Balai Latihan Kerja/Lembaga Pelatihan Kerja.

Palangka Raya, 20 Maret 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. AGUSTIAR SABRAN